

Relasi Kuasa Petani dan Buruh Tani Dalam Stratifikasi (Studi kepada Buruh Tani di Desa Garon, Madiun)

Azahra Kurnasari¹, Febriandita Tedjomurti², Arief Sudrajat³

Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya

Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231

¹ azahrakurniasari03@gmail.com, ² febrianditadedjomurti@unesa.ac.id, ³

ariefsudrajat@unesa.ac.id

ABSTRACT

In rural communities, there is definitely a distinct stratification that leads to power relations between landowners and farm workers. This power relationship will automatically give rise to exploitation because of the difference in position between the two parties. Land farmers who control land will be in control and play their role in society, but farm workers who do not have access to land depend on land farmers to get work. This research aims to analyse the conditions under which agricultural labour exploitation occurs in Garon Village, determine the forms of exploitation carried out by land farmers, and explain the impacts and the primary factors underlying exploitation. This research employs qualitative interviews and draws on Michel Foucault's theory of Power Relations. The research results show that several main factors in exploitation include land access, economic dependence, and different social hierarchies. Farm workers in Garon Village experience exploitation through wages and working hours that are not commensurate with the results of their work. The existence of exploitation will directly reduce the economic welfare of agricultural workers, thereby exacerbating social inequality.

ABSTRAK

Dalam masyarakat pedesaan pastinya terdapat stratifikasi yang berbeda, dimana hal tersebut menjadi penyebab dalam munculnya relasi kuasa antara petani lahan dengan buruh tani. Relasi kuasa tersebut otomatis akan menimbulkan terjadinya eksploitasi karena perbedaan posisi antara dua pihak. Petani lahan yang memiliki kuasa atas lahan akan memegang kendali dan memainkan perannya dalam masyarakat, tetapi buruh tani yang tidak mempunyai akses lahan, mereka hanya bergantung kepada petani lahan untuk memperoleh pekerjaan. Dari penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi relasi petani lahan dengan buruh tani. Penelitian ini memakai kualitatif dengan wawancara dan memakai teori Michel Foucault Relasi Kuasa. Hasil penelitian

Informasi Artikel

Submission: 31 Desember 2024

Last revision: 29 Oktober 2025

Acceptance: 12 November 2025

Publication: 28 November 2025

Keywords

Power Relations, Farm Labor

Kata kunci

Relasi Kuasa, Buruh Tani

menunjukkan terdapat beberapa faktor utama dalam relasi, seperti kepemilikan akses lahan, ketergantungan ekonomi, dan hierarki sosial yang berbeda. Buruh tani di Desa Garon mendapatkan eksploitasi dalam bentuk upah dan waktu yang tidak seimbang dengan hasil kerja. Adanya eksploitasi secara langsung berdampak terhadap penurunan kesejahteraan ekonomi buruh tani dan terjadi kesenjangan sosial yang semakin kuat.

© 2025 Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi

PENDAHULUAN

Dalam konteks pertanian, Indonesia dianggap sebagai negara agraris, dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 142,18 juta penduduk Indonesia yang bekerja, 40,65 juta terlibat di sektor pertanian. Dari perspektif individu, beberapa aspek struktur sosial tersembunyi dalam masyarakat pedesaan. Pada kenyataannya, mereka memiliki struktur sosial yang didasarkan pada status ekonomi, kepemilikan tanah, dan kendali atas sumber daya. Aspek-aspek ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan memiliki sistem stratifikasi yang komprehensif, di mana mereka biasanya mengalami ketidakseimbangan kekuasaan, yang mengarah pada eksploitasi buruh tani (Astuti, 2016).

Munculnya stratifikasi dalam masyarakat pedesaan disebabkan oleh adanya struktur sosial yang berbeda-beda. Hal ini pada akhirnya mengarah pada stratifikasi beberapa masyarakat pedesaan. Stratifikasi juga dapat didefinisikan sebagai sistem pengelompokan di mana beberapa kelompok memiliki aset atau kepemilikan yang signifikan (Rustamaji dkk., 2021). Masyarakat pedesaan yang terstratifikasi biasanya menikmati hak istimewa, seperti akses ekonomi yang memadai dan akses ke lahan yang luas. Stratifikasi sering terjadi dalam masyarakat, terutama di daerah pedesaan, di mana mereka yang berada di kelas atas dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang dominan, sementara mereka yang berada di kelas bawah dianggap memiliki sedikit kekuasaan (Trimerani dkk., 2022).

Stratifikasi yang terdapat dalam masyarakat pertanian merupakan bagian dari beberapa struktur sosial yang dibedakan berdasarkan kelas atau peran masing-masing individu. Struktur ini terbagi menjadi beberapa kategori, seperti kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas terdiri dari petani pemilik tanah, sedangkan kelas bawah terdiri dari mandor dan buruh tani. Munculnya stratifikasi ini terlihat jelas di masyarakat pedesaan, di mana mereka yang memiliki kekuasaan atau kepemilikan alat produksi yang lebih besar sering melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau sewenang-wenang terhadap buruh tani. Buruh tani sendiri tidak memiliki alat produksi dan terpaksa menjual tenaga kerja mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Masalah-masalah ini sering terjadi di daerah pedesaan, terutama di antara masyarakat pertanian. Biasanya, individu dengan kekuasaan yang lebih besar cenderung mendominasi masyarakat. Lebih lanjut, mereka dianggap berkuasa karena kendali mereka atas tanah, alat produksi, dan sumber daya lainnya. Sementara itu, buruh tani seringkali dianggap minoritas atau terpinggirkan karena mereka bekerja tetapi tidak memiliki akses terhadap lahan atau alat produksi (Efendi dkk., 2023).

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada dua kelompok petani di Desa Garon, masing-masing dengan struktur dan dinamika kekuasaan yang berbeda: pemilik lahan dan buruh tani. Kedua kelompok ini secara alami berasal dari strata yang berbeda: pemilik lahan mewakili kelas atas, dan buruh tani mewakili kelas bawah. Rasional penelitian ini adalah untuk memahami lebih baik dan menganalisis hubungan antara petani dan buruh tani, yang seringkali dieksploitasi secara ekonomi. Umumnya, petani pemilik lahan seringkali tidak mampu mengolah sawah mereka sendiri karena keterbatasan fisik dan sumber daya. Di balik hubungan antara petani dan buruh tani tersebut, ternyata terdapat relasi kuasa yang timpang, yang menunjukkan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat tani, di mana biasanya masyarakat tani Desa Garon yang memiliki lahan seringkali mengeksploitasi buruh tani dalam hal upah rendah, kondisi kerja yang tidak adil, bahkan ketergantungan ekonomi.

Desa Garon, yang mayoritas merupakan komunitas agraris, memiliki struktur sosial yang memupuk relasi kuasa dalam komunitas pertaniannya. Dalam konteks ini, relasi kuasa antara petani dan buruh tani berperan krusial dalam sistem ekonomi, yang berujung pada stratifikasi kepemilikan alat produksi dan lahan sawah. Buruh tani di Desa Garon seringkali mengalami eksploitasi atau tindakan yang dianggap menyimpang. Eksploitasi ini terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa dalam struktur sosial tersebut. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan permasalahan yang teridentifikasi, peneliti berupaya untuk mengeksplorasi topik penelitian ini secara lebih mendalam. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi topik-topik yang masih relevan dengan penelitian ini, seperti penelitian oleh Trimerani

dkk. (2022) yang membahas bagaimana stratifikasi sosial berdampak pada sistem bagi hasil di komunitas pertanian; dan penelitian oleh Sari & Handoyo (2021) yang membahas relasi kuasa antara penyuluh lapangan (PPL) dan petani.

Lebih lanjut, Dewanta (2022) mengkaji bagaimana pembentukan stratifikasi sosial berujung pada eksploitasi petani tembakau. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa masih sedikit penelitian yang membahas eksploitasi, khususnya di kalangan buruh tani. Maka, dalam konteks ini, peneliti ingin menganalisis lebih dalam eksploitasi buruh tani dalam konteks upah rendah dan jam kerja yang tidak adil, yang disebabkan oleh perbedaan relasi kuasa, mengkaji bagaimana relasi kuasa dapat memengaruhi hierarki sosial yang meliputi kepemilikan tanah, alat produksi, dan sumber daya, mengetahui bagaimana eksploitasi berdampak pada kesejahteraan buruh tani dalam konteks stratifikasi antara petani dan buruh tani, serta memberikan solusi atau strategi agar eksploitasi tidak terjadi di masyarakat tani Desa Garon. Urgensi penelitian ini bermula dari relasi kuasa yang mencerminkan eksploitasi buruh tani dalam konteks yang terstratifikasi. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana relasi kuasa dapat memicu eksploitasi buruh tani di masyarakat Desa Garon dan dampaknya terhadap kesejahteraan buruh tani. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor seperti kesenjangan akses sumber daya, upah rendah, dan hierarki kuasa yang tidak seimbang berkontribusi terhadap eksploitasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian *Relasi Kuasa Petani dan Buruh Tani Dalam Stratifikasi (Studi kepada Buruh Tani di Desa Garon, Madiun)* menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data empiris mengenai fenomena yang diteliti. Data yang dihasilkan peneliti bersifat kualitatif, menggambarkan suatu permasalahan, dan diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori untuk mendukung kesimpulan. Dari data yang terkumpul, peneliti dapat memahami dan menganalisis bagaimana relasi kuasa dapat memicu eksploitasi buruh tani dan menentukan relasi antara petani dan buruh tani dalam konteks ini. Penelitian ini menekankan interpretasi, makna, dan pemahaman subjektif para informan. Subjek informan dalam penelitian ini adalah dua orang buruh tani di komunitas pertanian Desa Garon. Periode penelitian dimulai pada 1-14 Desember 2024. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan fotografi, dengan responden diwawancarai untuk memperoleh informasi terkait penelitian. Selama observasi, peneliti mengamati secara langsung lingkungan interaksi antara buruh tani dan petani serta menyaksikan bagaimana kondisi kerja di komunitas pertanian tersebut. Untuk fotografi sendiri, peneliti mengumpulkan gambar-gambar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam teknik analisis data, terdapat tiga tahap: reduksi data, di mana peneliti akan memfokuskan penelitian pada analisis "Relasi Kuasa antara Petani dan Buruh Tani dalam Stratifikasi" (Studi Eksploitasi Buruh Tani di Desa Garon, Balerejo), dan hal ini dilakukan dengan mengamati dan memverifikasi hasil penelitian. Tahap terakhir untuk menjelaskan tulisan yang awalnya membingungkan adalah penyajian data dalam sistem kategori yang ringkas dan saling terkait, kemudian penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial dan Ekonomi di Desa Garon

Desa Garon terletak di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Sebagian besar penduduk Desa Garon bekerja sebagai petani dan buruh tani. Desa ini didukung oleh lahan yang subur dan luas, yaitu 384.025 hektar, sehingga secara tidak langsung, penduduk desa memanfaatkan lahan mereka untuk menanam padi dan palawija, dengan masyarakat lebih banyak menanam padi daripada palawija. Penduduk desa ini juga sangat bergantung pada sektor pertanian, bahkan komoditas utama mereka, yaitu padi, merupakan produk utama dalam kegiatan pertanian. Selain itu, beberapa palawija juga berfungsi sebagai tanaman penunjang. Keberadaan lahan yang subur ini menjadi faktor penting yang menjadikan Desa Garon dikenal sebagai desa yang penduduknya bekerja di bidang pertanian. Terlihat bahwa Desa Garon masih

menggunakan praktik budidaya padi tradisional, yang tentunya membutuhkan tenaga kerja utama buruh tani, mulai dari pengolahan hingga panen. Kegiatan pertanian ini secara tidak langsung juga menyumbang pendapatan utama bagi pemilik lahan dan buruh tani. Dengan demikian, terdapat hubungan saling menguntungkan antara pemilik lahan dan buruh tani, yang biasa disebut simbiosis. Namun, di balik hubungan ini terdapat realitas tersembunyi, seperti eksploitasi. Secara geografis, mayoritas penduduk Desa Garon hanya berpendidikan rendah hingga menengah. Sebagian besar penduduk desa hanya tamat sekolah dasar. Hal ini juga berdampak pada kesempatan kerja, dengan mayoritas bekerja sebagai petani atau buruh tani. Buruh tani biasanya berpenghasilan lebih rendah daripada pemilik lahan. Ketimpangan lapangan kerja di Desa Garon ini secara otomatis menciptakan ketimpangan sosial, yang pada akhirnya berujung pada stratifikasi sosial.

Dari perspektif sosial, Desa Garon masih mengakar dalam sistem kerja sama dan kebersamaan. Namun, pada kenyataannya, terdapat relasi kuasa yang berkontribusi terhadap ketimpangan antara petani dan buruh tani. Relasi kuasa ini berdampak langsung pada kedua belah pihak. Pemilik lahan memiliki kendali yang lebih besar atas lahan mereka dan akses yang lebih besar terhadap distribusi upah dan jadwal kerja. Sementara itu, buruh tani hanyalah pekerja yang menjual tenaga kerja mereka, yang seringkali dieksploitasi oleh petani. Ketimpangan posisi ini menciptakan stratifikasi sosial yang menekankan kepemilikan sumber daya dan kekuatan ekonomi.

Dari perspektif stratifikasi, penduduk Desa Garon seringkali mengalami ketimpangan sumber daya antara petani dan buruh tani. Ketimpangan ini juga memicu relasi kuasa dalam komunitas Desa Garon. Umumnya, petani memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada buruh tani, yang seringkali terpinggirkan. Di masyarakat pedesaan, mereka yang memiliki kekuasaan atau akses ekonomi yang lebih besar seringkali dianggap sebagai penguasa, yang mampu mengendalikan segala keinginan mereka. Sebaliknya, mereka yang kurang berkuasa seringkali dieksploitasi dan dipinggirkan. Hal ini tercermin jelas dalam komunitas petani Desa Garon. Ketika musim panen tiba, pemilik lahan seringkali meminta bantuan buruh tani untuk memanen padi dan palawija mereka.

Sementara itu, buruh tani juga membutuhkan pekerjaan dari para petani ini, yang seringkali menjual tenaga mereka untuk mendapatkan upah layak. Hubungan ini seringkali berujung pada eksploitasi berupa kesenjangan upah dan jam kerja yang tidak optimal. Hal ini niscaya akan berdampak langsung pada kesejahteraan dan taraf hidup buruh tani.

Eksploitasi muncul dari perbedaan status sosial atau relasi kuasa yang timpang, di mana pemilik lahan dapat memperlakukan buruh tani secara sewenang-wenang, tanpa memperhatikan nasib mereka. Situasi ini niscaya menimbulkan isu-isu krusial terkait stratifikasi dan relasi kuasa antara buruh tani dan petani, yang memengaruhi sistem ekonomi dan dinamika sosial. Namun, temuan Andi Asniar (2019) menunjukkan bahwa stratifikasi didorong oleh kelas sosial berdasarkan kepemilikan lahan cengkeh, yang pada gilirannya menciptakan hubungan kuasa antara kelas atas (pemilik lahan cengkeh) dan kelas bawah (buruh tani). Sementara itu, penelitian terkini menunjukkan bahwa hubungan kuasa antara petani dan buruh tani mendorong stratifikasi sosial. Kekuasaan ini secara tidak langsung berujung pada eksploitasi, menjadikan buruh tani sebagai korban. Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan Bapak Amin, 55 tahun, dari Desa Garon.

Oleh karena itu, faktor utama yang berkontribusi terhadap eksploitasi buruh tani di Desa Garon adalah ketidakseimbangan kuasa antara petani dan buruh tani. Biasanya, kuasa yang dimiliki petani lebih kuat daripada kuasa buruh tani, yang seringkali menjual tenaga mereka untuk mendapatkan upah, sementara pemilik lahan atau petani secara tidak langsung menyediakan pekerjaan bagi mereka. Namun, di balik semua itu, terdapat masalah krusial. Dari masalah ini, seseorang dengan kelas sosial yang tinggi akan memiliki kuasa dan dapat memainkan perannya. Akan tetapi, bagi seseorang yang berada di kelas bawah atau tidak memiliki hierarki sosial, secara tidak langsung, mereka tidak memiliki kekuasaan atas apa pun,

bahkan di daerah pedesaan, di mana mereka sering kali terpinggirkan atau dinomorduakan dalam hal akses.

Relasi kuasa buruh tani dan pemilik lahan di Desa Garon

Permasalahan eksploitasi di Desa Garon bermula dari ketidakseimbangan kekuasaan antara petani dan buruh tani. Kenyataannya, hal ini merupakan fenomena nyata dalam masyarakat agraris di Desa Garon. Permasalahan ini juga mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang seringkali menyebabkan buruh tani mengalami eksploitasi. Eksploitasi biasanya terjadi ketika individu-individu berbeda dalam hierarki sosial. Masyarakat Desa Garon secara alami menciptakan dua kelas yang berbeda: pemilik tanah dan buruh tani. Pemilik tanah berada di kelas atas, memiliki kekuasaan yang signifikan dan memiliki akses yang jauh berbeda terhadap peluang ekonomi dibandingkan buruh tani.

Sementara itu, buruh tani, dari perspektif kelas, berada di kelas bawah dan memiliki kekuasaan yang sangat kecil. Umumnya, buruh tani hanya berfungsi sebagai alat produksi bagi pemilik tanah, dan mereka seringkali mengalami eksploitasi melalui ketimpangan upah dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Dalam konteks ini, eksploitasi juga disebabkan oleh relasi kekuasaan yang timpang dalam masyarakat. Kekuasaan ini muncul dari munculnya stratifikasi sosial. Beberapa faktor utama yang menyebabkan eksploitasi buruh tani di Desa Garon, antara lain:

Kepemilikan akses lahan

Di masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Garon, hak kepemilikan tanah merupakan tanda kekuasaan. Kepemilikan tanah di masyarakat pedesaan seringkali sangat dihargai. Luas lahan menunjukkan tingkat kekuasaan yang tinggi dan menempatkan seseorang di puncak hierarki sosial. Di sisi lain, individu yang tidak memiliki tanah seringkali dianggap berada di dasar hierarki sosial karena mereka tidak memiliki akses langsung ke lahan yang luas. Konteks ini menunjukkan bahwa memiliki lahan yang luas meningkatkan kekuasaan mereka, memungkinkan mereka untuk memainkan peran yang mereka inginkan. Mereka yang tidak memiliki akses ke lahan hanya dapat menjual tenaga kerja mereka. Konteks ini menunjukkan hubungan kekuasaan yang melekat dalam perbedaan kepemilikan lahan. Di Desa Garon, terdapat dua kelompok: pemilik tanah dan buruh tani. Petani memegang kekuasaan langsung karena luas lahan yang mereka miliki, sementara buruh tani hanya bergantung pada pemilik tanah untuk pekerjaan. Dalam konteks ini, petani pemilik tanah memiliki kekuasaan yang signifikan, yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi buruh tani, termasuk dengan menetapkan upah dan jam kerja. Permasalahan ini seringkali diabaikan oleh buruh tani di Desa Garon, yang menganggap pekerjaan mereka sebagai bentuk rasa terima kasih kepada pemilik lahan atas pekerjaan yang mereka terima.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rustamaji dkk. (2021, yang menyoroti pembentukan stratifikasi yang mengarah pada eksploitasi buruh tani, sebuah proses yang seringkali disebabkan oleh distribusi yang tidak merata. Umumnya, petani dengan lahan yang luas seringkali memonopoli buruh tani, sehingga upah yang diterima tidak proporsional dengan hasil produksi mereka. Masalah ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh kepemilikan lahan yang tidak merata, dengan sebagian besar lahan yang luas dikuasai oleh petani kaya, sehingga buruh tani tidak memiliki hak kepemilikan lahan dan seringkali membuat mereka bergantung pada pemilik lahan. Sementara itu, temuan penelitian ini diperkuat oleh wawancara dengan Bapak Amin, 55 tahun, dari Desa Garon.

“Memang aspek yang paling utama, saya sering mengalami eksploitasi itu karena tidak mempunyai akses lahan yang luas. Petani pemilik lahan otomatis kan memiliki kuasa tinggi dari kepemilikan lahan tersebut, sebaliknya saya hanya sebagai buruh tani yang menumpang bekerja di petani tersebut. Jadi, ketika saya kerja juga terdapat aturan dari pemilik lahan, dimana saya juga bekerja dibawah aturan dari petani lahan itu.”

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas akses lahan dapat menyebabkan subordinasi dari petani ke buruh tani. Ketimpangan akses lahan ini secara tidak langsung memicu relasi kuasa yang menjadi faktor utama eksploitasi buruh tani melalui upah dan waktu. Melalui relasi kuasa ini, petani dengan akses lahan yang luas dapat menetapkan aturan dan kondisi kerja bagi buruh tani. Di saat yang sama, buruh tani hanya tunduk kepada pemilik lahan karena mereka juga menerima pekerjaan dari petani. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa eksploitasi terjadi akibat distribusi lahan yang tidak merata, di mana petani kaya seringkali menguasai lahan yang luas. Di saat yang sama, buruh tani hanya bergantung pada pemilik lahan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian.

Hierarki sosial yang berbeda

Dalam konteks ini, khususnya di masyarakat Desa Garon, struktur kekuasaan yang timpang juga berkontribusi terhadap eksploitasi. Jika seseorang berasal dari keluarga kaya dengan akses ekonomi yang luas, ia dapat berperan dalam masyarakat. Sebaliknya, mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah seringkali dipandang masyarakat sebagai berpenghasilan rendah. Dalam hierarki sosial, hubungan antara petani dan buruh tani menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan tidak langsung dalam sumber daya ekonomi. Hal ini tercermin dalam kehidupan masyarakat, di mana pemilik tanah seringkali memainkan peran utama, meraih posisi dominan dan kekuasaan atas tanah yang mereka miliki.

Sementara itu, buruh tani hanya bergantung pada pemilik tanah untuk pekerjaan, seringkali menempati posisi lemah dan terpinggirkan dalam masyarakat karena mereka tidak memiliki kendali atas tanah mereka. Kesenjangan dalam hierarki ini juga mencerminkan hubungan kekuasaan yang kuat. Hubungan kekuasaan ini memengaruhi baik petani maupun buruh tani, karena petani memegang kekuasaan baik di bidang ekonomi maupun sosial, membentuk keputusan dan peraturan yang memengaruhi buruh tani, seperti jam kerja dan upah. Sementara itu, buruh tani, yang tidak memiliki kekuasaan, seringkali tidak memiliki hak untuk menegosiasikan upah atau jam kerja. Akibatnya, buruh tani secara tidak langsung terjebak dalam kondisi kerja yang tidak adil. Para buruh tani ini mungkin mengandalkan ketergantungan mereka sebagai alat untuk bertahan hidup.

Di masyarakat Desa Garon, masalah ini memang lazim. Petani yang memiliki kekuasaan signifikan seringkali semena-mena memperlakukan buruh tani. Ketika musim panen tiba, para petani ini menugaskan buruh tani untuk memanen padi atau tanaman lainnya. Namun, di balik layar, mereka juga mengeksploitasi buruh tani dengan mengenakan upah yang dianggap tidak proporsional dengan hasil panen mereka. Situasi ini tak pelak lagi berujung pada ketidakseimbangan kekuasaan, di mana petani yang berkuasa dapat mengeksploitasi buruh tani yang tidak berdaya, yang seringkali dianggap lemah.

Sementara itu, temuan serupa oleh Andi Asniar (2019) mengungkapkan bahwa eksploitasi petani cengkeh di Kindang, Bulukumba, didorong oleh ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan patron-klien, di mana petani cengkeh seringkali membayar upah yang tidak setara kepada buruh tani. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kekuasaan petani cengkeh. Namun, penelitian ini menyoroti bahwa hubungan antara petani lahan dan buruh tani mengikuti hierarki sosial yang berbeda, di mana petani lahan memiliki wewenang penuh untuk menentukan upah dan mengalokasikan jam kerja, seringkali mengabaikan hak-hak buruh tani. Permasalahan ini menunjukkan relasi kuasa yang menciptakan hierarki sosial yang krusial, di mana buruh tani hanya menjual tenaga kerja mereka dan menjadi alat produksi bagi para petani. Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan Ibu Tini, 40 tahun, dari Desa Garon.

“Kalau masalah upah, biasanya saya menerimanya tidak sebanding dengan hasil kerja. Saya juga menyadari hanya sebagai buruh tani, mau tidak mau ya harus nurut dengan petani lahan itu, soalnya saya juga butuh pekerjaan dari mereka. Jadi, apapun kondisi yang saya kerjakan ini tergantung dari petani lahan karena mereka yang mempunyai kuasa atas lahannya sendiri, saya cuma buruh tani yang tidak mempunyai lahan sendiri.”

Permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa posisi yang timpang menyebabkan eksploitasi. Seringkali, pemilik tanah yang berkuasa dapat memaksakan aturan atau upah yang sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kerja keras buruh tani. Sementara itu, buruh tani sendiri tidak memiliki kuasa, sehingga mau tidak mau mereka menerima kondisi yang dipaksakan oleh pemilik tanah yang menyediakan pekerjaan.

Ketergantungan ekonomi kepada petani pemilik lahan

Umumnya, di masyarakat pedesaan, jika seseorang tidak memiliki akses terhadap lahan yang luas, mereka akan langsung mencari pekerjaan dari pemilik lahan. Hal ini disebabkan oleh relasi kuasa yang timpang antara petani dan buruh tani. Dalam konteks ini, ketergantungan ekonomi memperkuat eksploitasi. Di masyarakat Desa Garon, terdapat buruh tani dan pemilik lahan, sementara buruh tani yang tidak memiliki lahan mencari pekerjaan dari pemilik lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Buruh tani yang tidak memiliki akses terhadap lahan atau sumber daya seringkali rentan terhadap eksploitasi. Kondisi yang dihadapi buruh tani ini mencerminkan ketergantungan mereka pada pemilik lahan. Selain bekerja dan menjual tenaga kerja, mereka tidak dapat meninggalkan lahan mereka karena kurangnya faktor pendukung, seperti pelatihan keterampilan di luar sektor pertanian. Buruh tani pedesaan biasanya tidak punya pilihan selain bekerja untuk pemilik lahan, yang seringkali menerima upah yang tidak proporsional dengan hasil produksi mereka.

Ketergantungan ini menciptakan ketidakseimbangan antara pemilik lahan dan buruh tani, suatu situasi yang seringkali dipupuk oleh budaya patron-klien. Dalam konteks ini, pemilik lahan yang mempekerjakan buruh tani adalah patron, sementara buruh tani adalah klien yang menerima pekerjaan dari mereka. Munculnya hubungan ini secara tidak langsung menguntungkan petani, karena mereka dapat dengan bebas menentukan upah dan jam kerja tanpa bernegosiasi dengan buruh tani. Sementara itu, buruh tani enggan bernegosiasi karena menyadari keterbatasan akses mereka terhadap lahan dan seringkali bergantung pada petani untuk pekerjaan. Munculnya masalah ini secara tidak langsung menciptakan hubungan kuasa yang timpang di mana petani memiliki kendali yang lebih besar daripada buruh tani, sehingga memperkuat stratifikasi di masyarakat pedesaan. Penelitian (Rustamaji dkk., 2021) menunjukkan bahwa kesenjangan sosial ini menciptakan ketergantungan ekonomi, dengan buruh tani yang tidak memiliki lahan dan tidak dapat mengakses modal sendiri seringkali hanya mengandalkan petani untuk pekerjaan.

Sementara itu, hasil studi ini menyoroti bagaimana ketergantungan ekonomi sebagian disebabkan oleh perbedaan kekuasaan dan ketiadaan lahan. Ketergantungan ekonomi buruh tani ini seringkali mengarah pada eksploitasi upah dan jam kerja. Petani yang memiliki akses dan kuasa terhadap lahan dapat memengaruhi buruh tani. Meskipun buruh tani mengalami perlakuan tidak adil, mereka tidak dapat menolak atau bernegosiasi karena satu-satunya pekerjaan yang mereka andalkan berasal dari petani. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Garon tidak memiliki pelatihan apa pun. Akibatnya, buruh tani hanya bergantung pada pemilik lahan. Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan Bapak Amin, 55 tahun, dari Desa Garon.

“Saya kalau tidak menjadi buruh tani ya tidak mempunyai pekerjaan, karena satu-satunya yang dapat saya andalkan pekerjaan dari petani lahan saja. Mau bekerja selain buruh tani ya tidak mempunyai lulusan ijazah yang tinggi. Mau tidak mau ya hanya bekerja sebagai buruh tani, selain itu saya juga tidak mempunyai lahan sawah.”

Oleh karena itu, tentu saja terdapat perbedaan antara kedua temuan penelitian ini. Penelitian sebelumnya hanya menyoroti ketergantungan ekonomi yang dialami buruh tani akibat keterbatasan lahan. Sebaliknya, penelitian ini, selain membahas ketergantungan ekonomi, juga membahas bagaimana ketergantungan ini secara tidak langsung mengarah pada eksploitasi.

Bentuk eksploitasi buruh tani

Eksploitasi di masyarakat Desa Garon memiliki beberapa bentuk, termasuk ketimpangan upah. Hal ini jelas mencerminkan ketimpangan sosial, di mana hubungan kerja yang tidak setara antara petani dan buruh tani dapat menyebabkan berbagai bentuk eksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi di masyarakat Desa Garon meliputi:

Upah yang tidak seimbang

Di masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Garon, eksploitasi upah yang tidak adil terjadi, sebuah isu krusial. Ketimpangan upah ini menciptakan kesenjangan dalam hubungan kerja antara petani dan buruh tani. Buruh tani biasanya menerima upah rendah yang tidak sepadan dengan kerja keras mereka, karena upah seringkali ditentukan semata-mata oleh pemilik lahan. Oleh karena itu, buruh tani terpaksa menerima persyaratan upah petani sendiri, yang sangat tidak adil. Di Desa Garon, buruh tani seringkali menerima upah yang tidak sepadan dengan kerja keras mereka. Masalah ini bermula dari posisi tawar mereka yang lemah, akibat ketiadaan lahan dan ketergantungan yang besar pada petani. Buruh tani di Desa Garon biasanya menerima upah harian yang hampir tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Situasi ini sangat tidak tepat, karena petani secara tidak langsung mengabaikan kesejahteraan buruh tani.

Upah rendah seringkali diperparah oleh kurangnya mekanisme negosiasi dengan petani, dan upah yang mereka terima seringkali ditentukan secara sepihak oleh petani sendiri. Namun, isu ini sejalan dengan temuan penelitian (Trimerani dkk., 2022), yang menyoroti bagaimana kesenjangan upah seringkali disebabkan oleh sistem bagi hasil yang tidak adil, di mana petani pemilik lahan mendapatkan keuntungan dari panen yang lebih besar, sementara buruh tani hanya menerima sebagian kecil dari surplus, seringkali hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, temuan penelitian saat ini mengungkapkan bahwa distribusi upah yang tidak adil seringkali merupakan akibat dari keputusan distribusi sepihak yang dibuat tanpa konsultasi dengan buruh tani. Masalah ini secara otomatis mengakibatkan buruh tani hanya menerima jumlah yang kecil, seringkali tidak cukup untuk menopang mata pencaharian mereka. Lebih lanjut, terdapat sistem upah berbasis panen di mana buruh tani di Desa Garon menerima upah bukan dalam bentuk uang tunai melainkan beras. Namun, prinsip keadilan distributif dan proporsional sangat penting untuk melindungi hak-hak petani (Hidayat & Sujianto, 2023).

Waktu kerja yang tidak berbanding

Di masyarakat pedesaan, terdapat hubungan kerja antara pemilik lahan dan buruh tani, di mana pemilik lahan menyediakan pekerjaan bagi buruh tani. Ketimpangan sering terjadi dalam hubungan kerja ini, dengan buruh tani yang menjual tenaga kerja mereka kepada petani diperlakukan tidak adil. Eksploitasi waktu di masyarakat pedesaan terjadi ketika buruh tani bekerja hingga senja, namun menerima upah yang tidak proporsional dengan waktu dan tenaga yang mereka curahkan. Di masyarakat Desa Garon, buruh tani sering bekerja dari pagi hingga senja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Umumnya, pekerjaan buruh tani melibatkan aktivitas fisik, seperti menanam, memanen, membajak, dan

mencangkul. Pekerjaan dimulai pada pagi hari dan berlanjut hingga sore hari; wajar saja, mereka bekerja dengan beban yang tinggi. Meskipun selesai pada sore hari, upah yang mereka terima seringkali tidak mencerminkan kerja keras buruh tani, yang dibayar upah harian yang hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan jam kerja yang tidak proporsional dengan hasil, hal ini mencerminkan eksploitasi dalam bentuk waktu. Temuan dari Trimerani dkk. (2022) mengungkapkan bahwa ketika buruh tani menerima hasil panen mereka, mereka seringkali menerima porsi yang tidak proporsional dengan kerja keras dan tenaga mereka. Kurangnya regulasi kerja dari kedua belah pihak memperburuk situasi ini. Sementara itu, penelitian terkini menyoroti eksploitasi waktu yang diakibatkan oleh relasi kuasa yang timpang antara petani dan buruh tani. Relasi kuasa ini pada akhirnya mengakibatkan jam kerja buruh tani yang tidak proporsional dengan upah yang mereka terima.

Dampak Eksploitasi Buruh Tani

Eksploitasi buruh tani di Desa Garon secara tidak langsung berdampak signifikan, meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, psikologis, dan ekonomi. Eksploitasi ini juga berdampak langsung pada buruh tani, yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi justru diperlakukan dengan buruk. Beberapa dampak eksploitasi meliputi:

Kesejahteraan ekonomi yang menurun

Ketika eksploitasi terjadi, buruh tani mengalami penurunan kesejahteraan. Seharusnya buruh tani bekerja untuk menjaga kesejahteraan mereka, tetapi hal ini berbanding terbalik karena mereka sering dieksploitasi, yang menghambat kehidupan mereka. Dalam konteks ini, buruh tani yang bersedia bekerja untuk mencapai hasil yang diinginkan tidak memenuhi harapan mereka. Eksploitasi waktu dan upah yang tidak adil berkontribusi, secara tidak langsung, pada ketidakmampuan buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan upah yang minim, mereka seringkali kesulitan untuk membeli makanan atau membiayai pendidikan anak-anak mereka. Akibat permasalahan ini, buruh tani terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit mereka hindari. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Rustamaji dkk., 2021) yang menyoroti bahwa buruh tani di Jawa Timur menerima upah yang tidak proporsional dengan pekerjaan mereka, sehingga mengakibatkan kemiskinan dan penurunan kualitas hidup yang drastis. Namun, studi ini menambahkan temuan baru: penurunan kesejahteraan ekonomi bukan disebabkan oleh ketimpangan upah dan waktu, melainkan oleh faktor-faktor seperti relasi kuasa dan struktur sosial yang tidak seimbang yang menyebabkan eksploitasi, sehingga berdampak pada kesejahteraan ekonomi buruh tani di Desa Garon. Secara kultural, normalisasi upah rendah bagi buruh tani mengakibatkan rendahnya standar hidup. Meskipun kesejahteraan petani relatif rendah, mereka sendiri, sebagai subjek, menganggap pekerjaan mereka cukup untuk menghidupi keluarga dan dianggap sejahtera (Anggraini & Zuhdi, 2022).

Kesenjangan sosial yang kuat

Eksploitasi di masyarakat pedesaan juga berkontribusi pada munculnya ketimpangan yang semakin parah, di mana petani pemilik tanah seringkali mengendalikan sistem ketenagakerjaan. Hal ini terjadi karena mereka memiliki kekuasaan dan dianggap kelas yang lebih tinggi daripada buruh tani. Sementara itu, buruh tani, yang kurang memiliki kendali atas akses lahan, seringkali dipandang masyarakat sebagai pihak yang subordinat. Adanya ketidakseimbangan kekuasaan juga merupakan faktor signifikan dalam eksploitasi, di mana buruh tani yang bekerja keras seringkali mendapatkan hasil yang tidak proporsional dengan jam kerja mereka. Eksploitasi ini secara tidak langsung memperkuat ketimpangan sosial, dengan petani semakin memperkaya diri sendiri sementara buruh tani terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Umumnya, munculnya ketimpangan sosial juga berujung pada konflik antara petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan oleh posisi yang timpang di mana petani seringkali memperlakukan buruh tani dengan buruk, sementara buruh tani hanya bisa menoleransi tindakan pemilik lahan. Rustamaji dkk. (2021) menyoroti bahwa perbedaan struktur kekuasaan menyebabkan distribusi hasil yang timpang, akibat

dominasi petani, yang mengakibatkan buruh tani mengalami ketimpangan sosial. Namun, penelitian terkini mengungkapkan bahwa perbedaan relasi kekuasaan membuat buruh tani bergantung, sehingga mereka tidak punya pilihan selain bekerja untuk pemilik lahan, meskipun kondisi kerja yang mereka alami seringkali tidak adil. Akibatnya, buruh tani harus melakukan kegiatan lain untuk bertahan hidup. Mekanisme bertahan hidup buruh tani meliputi pemanfaatan lahan dan hubungan dengan petani lain, yang seringkali menyebabkan ketergantungan pada bantuan pemerintah atau utang (Nurfritriani dkk., 2021). Lebih lanjut, ketimpangan ini memaksa buruh tani untuk bekerja hingga usia lanjut. Buruh tani berusia 60 tahun ke atas tetap termotivasi oleh faktor ekonomi (Fahrudin & Rohman, 2024).

SIMPULAN

Di masyarakat pedesaan, struktur sosial yang timpang sering kali terjadi, yang secara tidak langsung dapat memicu eksploitasi. Eksploitasi ini bermula dari relasi kuasa yang timpang antara petani dan buruh tani. Eksploitasi ini merugikan buruh tani. Umumnya, mereka yang memiliki kuasa tinggi akan selalu memegang kendali atas hak-hak mereka dan menduduki posisi superior. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki kuasa hanya dapat bergantung pada orang lain karena mereka tidak memiliki kedudukan dan seringkali terpinggirkan. Di masyarakat Desa Garon, buruh tani sering mengalami eksploitasi melalui upah dan jam kerja yang tidak adil dan tidak sepadan dengan hasil kerja mereka. Hal ini disebabkan oleh relasi kuasa yang timpang, di mana petani dapat berperan dalam masyarakat, sementara buruh tani hanyalah pekerja yang menjual tenaga mereka. Dalam konteks ini, eksploitasi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk akses lahan, perbedaan hierarki sosial, dan ketergantungan buruh tani terhadap pemilik lahan. Faktor-faktor ini, pada gilirannya, muncul dari struktur yang timpang yang secara tidak langsung berkontribusi pada ketimpangan sosial. Umumnya, ketika buruh tani mengalami eksploitasi, mereka juga akan merasakan dampak langsung, seperti menurunnya kesejahteraan ekonomi, yang seharusnya membuat mereka bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun, hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang diperoleh karena petani pemilik lahan biasanya memberikan upah yang tidak sebanding dengan waktu dan kerja keras buruh tani. Pada akhirnya, buruh tani secara tidak langsung terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemudian, dampak dari meningkatnya ketimpangan sosial juga terasa. Hal ini memang berdampak signifikan karena dengan adanya perbedaan kekuasaan, otomatis terjadi hierarki, sehingga seringkali petani memegang kekuasaan sementara buruh tani hanyalah pekerja biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. R., & Zuhdi, M. S. (2022). Kesejahteraan Sosial Buruh Tani di Desa Wonocoyo. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(2), 295-304.
- Asniar, A.. (2019). Stratifikasi Sosial Masyarakat Petani Cengkeh di Kindang Bulukumba. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*, 3, 1-10.
- Dewanta, B.A. (2022). Kesetiaan Palsu: Eksploitasi Petani Tembakau di Temanggung. *Lembaran Antropologi*, 1(2), 121-139.
- Efendi, A.J., Saputra, F.B., Graha, R.D.R. (2023). Hubungan Kerja Petani dan Buruh Tani dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Klompangan, Ajung, Jember. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(4), 217-229.
- Fahrudin, F. M., & Rohman, A. (2024). Motivasi Kerja Buruh Tani Usia di Atas 60 Tahun dalam prespektif etos kerja islam (Studi Kasus Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik). *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 3(1)
- Hidayat, M. S., & Sujianto, A. E. (2023). Meninjau Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi

Kualitatif tentang Keadilan dan Kesejahteraan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 01-15.

Nurfitriani, N., Rahman, B., & Febriani, L. (2021). Mekanisme Survival Buruh Tani Lanjut Usia (Lansia) Desa Mancung Bangka Barat. *Jurnal sosial dan sains*, 1(2), 75-81.

Sari, D.A. & Handoyo, P. (2021). RELASI KUASA ANTARA PPL DENGAN PETANI DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG. *Paradigma*, 10(1).

Trimerani, R., Jamhari, & Waluyati, L. R. (2022). Dampak Stratifikasi Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Petani. *AGRIFITIA : Journal of Agribusiness Plantation*, 2(1), 60-69.